

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Flora Dianti, 2023, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia; Perbandingan HIR dan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2017, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, : Alfabeta, Bandung.
- J. Pajar Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Fakultas Hukum Lampung.
- Jhon Gilissen dan Frits Gorle, 2001, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. ed. I, cet. 2, Prenada Media Grup, Depok.
- Kadi Sukarna, 2016, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, Unnes Press, Semarang.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung.
- O.C. Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- R. Atang Ranomiharjo, 2002, *Dalam: Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mumudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang.

Perundang-Undangan:

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Reglement Indonesia Baru 1941.

Staatsblad No. 44.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disahkan DPR Republik Indonesia 18 November 2025 (Belum diundangkan).

Jurnal:

Asep Saepullah, *"Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan," Mahkamah*, Vol. 3, No 1 (2018).

Daniel David Julio Lakada, Debby Telly Antouw, Grace Yurico Bawole, *"Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum Tentang Cyber Crime)," Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 12, No. 4 (2024).

Efren Nova, *"Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pemenuhan Keadilan Korban"*, *Swara Justisia*, Vol. 9 No. 1 (2025).

Fernando Louis Pantow, *"Hubungan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Lex Crimen*, Vol. 7, No 4 (2018).

Fien Ratih Kabuhung, Nixon Wullur, Herry F.D. Tuwaidan, *"Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Serta Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota"*, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7 (2021).

Fitri Darizta, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, M. Fathony, dan Desti Indah Sari, *"Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia," Lex Stricta*, Vol. 2, No 2 (2023).

Gina Raudhatul Jannah, "Sejarah Hukum Acara Pidana, Alur Beracara, dan Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2 No. 12 (2024).

Hasnawati, Muhammad Safrin "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Prenata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2 (2024).

I Kadek Apdila Wirawan, Pita Permatasari Sari, " Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan", *IBLAM Law Review*, Vol. 02 No. 03 (2022).

Inda Pongantung, Olga A. Pangkereo, Nelly Pinangkaan, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7 (2021).

Julius Bernat Hasibuan, "Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal of Law*, Vol 6, No 1(2019).

Natanael Israel Kumendong, Wempie Jh. Kumendong, Roy Ronny Lembong, "Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2 (2021).

Ni Wayan Beniartini, "Perkembangan Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2 (2020).

Nilma Suryani, Najmuddin, Achmad Megantara, "Analisa Perubahan Barang Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pemenuhan Keadilan Korban", *Jurnal Das Sollen*, Vol. 10, No. 2 (2024).

Sunariyo, Elviandri, Ut Rahayuningsih, Bayu Prasetyo, "Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime Dalam KUHP dan UU ITE", *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, Vol. 4, No. 3 (2025).

Artikel:

Mirza Fahlevy, "Alat bukti dalam perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)", <https://www.pn-jantho.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 18 maret 2025 Jam 02.00 wib.

Ervana Triakarinaputri, "Revisi KUHP, Pengamatan Hakim Jadi Alat Bukti," <https://www.tempo.co/politik/revisi-kuhp-pengamatan-hakim-jadi-alat-bukti-2089251>, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2025 Jam 03.00 wib.